

**ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Yulia Citra

180710002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Yulia Citra

180710002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Citra
NPM : 180710002
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya rang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah penulisan skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiasi dan dapat dibuktikan, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan penulisan naskah skripsi sebagai tugas akhir yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat saya ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Juli 2022



Yulia Citra
180710002

**ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATAM**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Yulia Citra
180710002**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 01 Agustus 2022


**Drs. Ukas S.H., M.Hum.
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Kemunculan para pedagang kaki lima memicu berbagai konflik di kalangan masyarakat baik itu pro maupun kontra kebanyakan konflik tersebut sering terjadi di Indonesia terutama di kota-kota seperti halnya di kota Batam, di mana berbagai konflik tersebut melahirkan beberapa penghabambat aktifitas bagi masyarakat seperti susahnya akses bagi pejalan kaki yang harus melewati area atau lokasi perdagangan yang sangat ramai dengan jualan dan gerobak yang digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima ditambah lagi dengan banyaknya lokasi yang ditempati oleh para pedagang membuat masyarakat khususnya pejalan kaki menjadi terhambat untuk berjalan menuju lokasi yang di tuju. Selain akses yang terhambat beberapa faktor yang juga tidak mengenakan juga dialami masyarakat seperti halnya beberapa fasilitas yang rusak dan tidak berfungsi seperti taman yang tidak berfungsi lagi dikarenakan yang digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima. Adapun berdasarkan dengan pemaparan terkait PKL adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 serta kendala yang muncul dan beserta solusi mengenai efektivitas pelaksanaan dan pemberdayaan bagi para pedagang kaki lima. di kota Batam yang peneliti khususkan di kawasan Tanjung Piayu. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder dari hasil analisis dari jurnal serta Peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Yang mana untuk mengetahui pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan terkait Pedagang Kaki Lima ini, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Batam tentang PKL, dan (2) Kendala yang timbul didalam penataan dan pemberdayaan PKL yang ada di kota Batam tersebut.

Kata kunci : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, Penataan dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The emergence of street vendors triggers various conflicts among the community, both pros and cons. Most of these conflicts often occur in Indonesia, especially in cities such as Batam city, where these conflicts give birth to several barriers to activities for the community, such as the difficulty of access for pedestrians. The feet that have to pass through a very busy trading area or location with sales and carts used by street vendors coupled with the many locations occupied by traders make it difficult for people, especially pedestrians, to walk to their intended location. In addition to obstructed access, several factors that are also not wearing are also experienced by the community, such as several damaged and non-functioning facilities such as parks that are no longer functioning because they are used as places to sell by street vendors. As for the explanation related to street vendors, this research aims to determine the effectiveness of Regional Regulation Number 1 of 2019 as well as the obstacles that arise and along with solutions regarding the effectiveness of implementation and empowerment for street vendors. in the city of Batam which researchers specialize in the Tanjung Piayu area. The types and sources of data in this study, the authors use primary data, namely data obtained from field interviews and secondary data from analysis results from journals and laws and regulations that are related to the research. In order to find out the implementation of Arrangement and Empowerment related to Street Vendors, the researcher will focus this research on 2 (two) things, namely (1) How to Enforce Regional Regulation Number 1 of 2019 in Batam City regarding PKL, and (2) Obstacles that arise in the arrangement and empowerment of street vendors in the city of Batam.

Keywords: *Regional Regulation Number 1 of 2019, Structuring and Street Vendors.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin segala puji saya panjatkan atas kehadiran dan kebaikan Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, yang mana tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dibuat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) pada program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran dalam penulisan ini akan diterima dengan senang hati untuk memberikan semangat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Dengan berbagai macam keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan serta dorongan dari banyak pihak yang mendukung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrail Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Putera Batam
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak memberikan lmu dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staff Administrasi Universitas Putera Batam yang telah banyak memberikan bantuan selama 4 tahun di Universitas Putera Batam
6. Kepada ayahanda Abadi dan Ibunda Wela tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan support sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan skripsi ini.

7. Abang, kakak serta seluruh keluarga yang memberikan support dan semangat.
8. Rekan-rekan mahasiswa, teman-teman se-Almamater khususnya angkatan tahun 2018 yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan Studi Strata I ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu menjaga kita semua dimanapun berada, Aamiin.

Batam, 27 Juli 2022



Yulia Citra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined. iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	9
2.1.2 Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	155
2.2 Kerangka Yuridis	16
2.2.1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019	16
2.2.2. Pembangunan Nasional	20
2.2.3. Pedagang Kaki Lima.....	22
2.2.4 Hak para Pedagang Kaki Lima apabila dilakukan penertiban	25
2.3. Penelitian Terdahulu	25
2.4. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Sifat Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data	31

3.5 Metode Pengumpulan data	32
3.6 Metode Analisis Data	33
3.7 lokasi dan waktu penelitian.....	333
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Penegakan dan Pelaksanaan Hukum Dan Kewenangan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam	34
4.1.2 Hambatan Serta Upaya Pemerintah Daerah (Satpol PP) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam.....	36
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Penegakan dan pelaksanaan hukum serta kewenangan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam	41
4.2.2 Upaya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik .	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 simpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	